



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 700/Kep.015-Inspektorat/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

BERBASIS PRIORITAS DAN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH

KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- c. bahwa sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2021 angka 2010, Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Penjelasan Umum Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 mengenai program kerja pembinaan dan pengawasan, auditi, dan sumber daya aparatur pelaksana Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Inspektur Daerah Kota Bandung melaporkan resume hasil pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan kepada Wali Kota Bandung sebagai bahan penyajian laporan hasil pengawasan baik semesteran maupun tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.987-Inspektorat/2024 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Januari 2025  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 700/Kep.015-Inspektorat/2025  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS PRIORITAS DAN RISIKO  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025

PENJELASAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
TERHADAP PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Pendahuluan

A. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung;
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bandung;
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
6. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultasi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik];
7. Audit Keuangan yang dimaksud adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran;



8. Audit Ketaatan adalah audit untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Adapun pengertian audit ketaatan dari berbagai sumber;
9. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
10. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
11. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
12. *Probity Audit* adalah peran APIP dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa dengan melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (*real time audit*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *probity* (kejujuran, kebenaran dan integritas).
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
16. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP;
17. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
18. Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian;
19. Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis;
20. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan;
21. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko bahwa suatu organisasi bersedia menerimanya;
22. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud


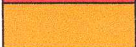
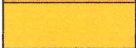


- a. memberikan informasi kepada pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Prioritas dan Risiko Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Daerah;
- b. mengoordinasikan kegiatan pengawasan dengan pihak terkait agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- c. mendapatkan dukungan dan masukan dari stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP Inspektorat Daerah.

2. Tujuan

Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran APIP Inspektorat Daerah dalam melaksanakan dan meningkatkan pengawasan internal dan sebagai bahan tolok ukur dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Risiko Audit

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah menerapkan manajemen Berbasis Prioritas dan Risiko (*Risk And Priority Based Audit*) dengan maksud agar risiko yang dihadapi auditor dapat diminimalisir dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dapat mengurangi atau menghilangkan risiko yang dihadapi oleh auditi dan memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan. Penerapan manajemen Audit Berbasis Prioritas dan Risiko (*Risk And Priority Based Audit*) dimulai dengan penilaian risiko. Kegiatan menganalisis risiko menggunakan informasi yang tersedia di masing-masing perangkat daerah. Adapun faktor-faktor yang menjadi tolok ukur penentuan bobot risiko didasarkan pada komponen: Besaran Anggaran; Urusan Pemerintahan; Status TLHP eksternal dan internal; Besaran Pengembalian Keuangan Negara/Daerah; dan Besaran nilai Hibah Bansos. Dengan demikian lima komponen tersebut, pengkategorian mulai dari risiko sangat tinggi sampai dengan risiko rendah, sebagai berikut:

	PD dengan risiko Sangat Tinggi
	PD dengan risiko Tinggi
	PD dengan risiko sedang
	PD dengan risiko rendah
	PD dengan risiko sangat rendah

Tingkat risiko masing-masing perangkat daerah, belum secara utuh dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko. Hal ini disebabkan belum terselesaikannya penghitungan penganalisaan terkait dengan skala risiko masing-masing Perangkat Daerah. Namun hal tersebut akan menjadi prioritas di triwulan I dan II untuk penentuan manajemen risiko Perangkat Daerah sebagai dasar PKPT Berbasis Prioritas dan Risiko.

#### D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Internal oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan serta kode etik pemeriksaan. Adapun ruang lingkup PKPT Tahun Anggaran 2025 ini adalah:

1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung.
2. melakukan kegiatan pembinaan dengan penekanan pada kegiatan pre-emptif yakni melakukan pembinaan dengan pendekatan-pendekatan kemitraan melalui konsultasi, pendampingan dan telaahan staf yang disampaikan kepada pimpinan.
3. melakukan kegiatan pencegahan untuk mengurangi dan menghilangkan timbulnya risiko yang tidak diinginkan seperti terjadinya KKN melalui berbagai kegiatan yang antara lain : revidu, monitoring dan evaluasi serta pengawasan lainnya seperti penyusunan kebijakan pengawasan, workshop/sosialisasi/bimtek/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), studi tiru, pencegahan gratifikasi, konflik of interest melalui kegiatan *Whistleblowing system* (WBS) dan sebagainya.
4. melakukan kegiatan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan investigative untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan.
5. melakukan kegiatan korektif dengan menindaklanjuti temuan-temuan pengawas internal dan eksternal.

#### II. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2025

##### A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung, sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal 4, bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun fungsi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



## B. Fokus, dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan

1. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berbasis prioritas dan risiko dengan memperhatikan Asta Cita yang merupakan prioritas nasional Tahun 2025, sebagai berikut:
  - a. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  - b. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
  - c. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
  - d. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
  - e. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  - f. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
  - g. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
  - h. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3. Sehubungan dengan angka 2, pengawasan Tahun 2025 diprioritaskan kepada:
  - a. Pengawasan Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro:
    - 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
    - 2) Tingkat Kemiskinan;
    - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka;
    - 4) Indeks Modal Manusia;
    - 5) Rasio Gini; dan
    - 6) Intensitas Emisi GRK.
  - b. Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- c. Pengawasan prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah:
  - 1) Pelaksanaan pengawasan prioritas daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025, seperti:
    - a) pengendalian inflasi daerah;
    - b) investasi dan pelayanan publik;
    - c) penanganan stunting; dan
    - d) swasembada pangan.
  - 2) Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
    - a) pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
    - b) pemeriksaan kinerja.
- d. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention* (MCP);
- e. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah:
  - 1) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
  - 2) Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;
  - 3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018;
  - 4) Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; dan
  - 5) Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.
- f. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.



No.	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>b. pengelolaan sumber daya manusia;</li> <li>c. praktik profesional;</li> <li>d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;</li> <li>e. budaya dan hubungan organisasi; dan</li> <li>f. struktur tata kelola.</li> </ul>
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<p><i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan pengendalian;</li> <li>b. penilaian risiko;</li> <li>c. kegiatan pengendalian;</li> <li>d. informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. pemantauan pengendalian intern.</li> </ul>
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepemimpinan;</li> <li>2) strategi dan kebijakan manajemen;</li> <li>3) sumber daya manusia;</li> <li>4) kemitraan; dan</li> <li>5) proses manajemen risiko.</li> </ul> </li> <li>b. Hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) aktivitas penanganan risiko; dan</li> <li>2) outcomes.</li> </ul> </li> </ul>
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan pelayanan publik;</li> <li>b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</li> <li>c. pengawasan keuangan daerah/ APBD;</li> <li>d. pengawasan pengadaan barang dan jasa;</li> <li>e. pengawasan manajemen rumah sakit;</li> <li>f. audit kinerja;</li> <li>g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</li> </ul>

No.	Sasaran	Fokus
		<div>h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</div> <div>i. audit investigasi;</div> <div>j. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</div> <div>k. Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE); dan</div> <div>l. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</div>

4. Tugas mandatory inspektorat daerah:
- a. Melakukan langkah konkret untuk peningkatan kualitas hasil pengawasan, sehingga hasil pengawasan inspektorat berdampak dan dirasakan manfaatnya dalam perbaikan tata kelola pemerintahan daerah;

b. Menyusun Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko dengan memperhatikan prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan

c. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan.

C. Indikator Kinerja Tahun 2025

1. Auditi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, terdapat 60 Auditi yang dilaksanakan pada tahun 2025. Penentuan PKPT Berbasis Prioritas dan Risiko tahun anggaran 2025, secara teknis tersajikan di dalam Lampiran II.

Auditi yang diperiksa melalui pemeriksaan kinerja, tujuan tertentu, dan audit tematik serta pemeriksaan khusus berupa pengaduan masyarakat maupun pelimpahan Surat Pengaduan yang dilakukan oleh:

- a. Inspektur Pembantu I, terdiri dari:
- 1) Pemeriksaan Kinerja, Ketaatan, SPM dan/atau NSPK, terdiri dari:

a) Audit Kinerja Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup;

b) Audit Ketaatan Program Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

c) Pemeriksaan Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d) Pemeriksaan Penerapan NSPK Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;



- 2) Reviu, terdiri dari:
  - a) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
  - b) Reviu KUA-PPAS Murni dan Perubahannya;
  - c) Reviu RKA Perangkat Daerah Murni dan Perubahannya;
  - d) Reviu DAK Fisik Bidang Sanitasi (Tahap I, Tahap II, Tahap III) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
  - e) Reviu DAK Fisik Bidang Pertanian (Tahap I, Tahap II, Tahap III) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
  - f) Reviu DAU Fisik Bidang Pekerjaan Umum (Tahap I, Tahap II, Tahap III) pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
  - g) Reviu Kinerja Pelayanan Publik Sektor Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - h) Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Tahun 2026 pada Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat PPPK;
  - i) Reviu Keputusan Wali Kota Nomor 1328 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Terstandarisasi.
- 3) Monitoring dan/atau Evaluasi, terdiri dari:
  - a) monitoring dan Evaluasi hasil *Cash Opname Stock Opname* (COSO);
  - b) evaluasi Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah.
- 4) Pengawasan lainnya termasuk pendampingan Perangkat Daerah (*consulting*), terdiri dari:
  - a) audit PBJ atas implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Dinas Perhubungan;
  - b) pendampingan pelaksanaan *Cash Opname Stock Opname* (COSO);
  - c) pendampingan pemeriksaan BPK/Interim, Terinci, dan ATT;
  - d) pendampingan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
  - e) *Coaching Clinic*;
  - f) PK APIP.
- b. Inspektur Pembantu II, terdiri dari:
  - 1) Pemeriksaan Kinerja, Ketaatan, SPM dan/atau NSPK, terdiri dari:
    - a) Audit Ketaatan:
      - (1) program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
      - (2) program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;

- b) Pemeriksaan penerapan SPM urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  - c) Pemeriksaan penerapan NSPK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- 2) Reviu, terdiri dari:
  - a) Reviu DAK Fisik Bidang Kesehatan realisasi penyerapan 2024 dan perencanaan Tahun 2025;
  - b) Reviu DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan;
  - c) Reviu DAU Kelurahan laporan realisasi Tahun 2024 dan Perencanaan Tahun 2025;
  - d) Reviu DAU Kelurahan realisasi tahap 1;
  - e) Reviu DAU Kesehatan laporan realisasi penyerapan 2024 dan perencanaan Tahun 2025;
  - f) Reviu DAU Kesehatan realisasi Tahap 1;
  - g) Reviu DAU Kesehatan realisasi Tahap 2;
  - h) Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan (RSUD, RSBK, RSKGM);
  - i) Reviu Pencegahan Korupsi terkait Program Makan Bergizi Sehat yang didanai oleh APBD Tahun Berjalan;
  - j) Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Tahun 2026 pada Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat PPPK;
  - k) Reviu Keputusan Wali Kota Nomor 1328 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Terstandarisasi.
- 3) Monitoring dan/atau Evaluasi, terdiri dari:
  - a) Monev Pelayanan Publik Kecamatan Cinambo;
  - b) Evaluasi Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah.
- 4) Pengawasan lainnya termasuk pendampingan Perangkat Daerah (consulting):
  - a) Audit PBJ atas Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  - b) Hibah/Bansos Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  - c) *Coaching Clinic*;
  - d) PK APIP.
- c. Inspektur Pembantu III, terdiri dari:
  - 1) Pemeriksaan Kinerja, Ketaatan, SPM dan/atau NSPK, terdiri dari:
    - a) Audit Kinerja Penanggulangan Kemiskinan tingkat Pemerintah Daerah;
    - b) Audit Kinerja Prevalensi Stunting tingkat Pemerintah Daerah;



- c) Pemeriksaan Penerapan SPM Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
  - d) Pemeriksaan Penerapan SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial;
  - e) Pemeriksaan Penerapan NSPK Urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan;
- 2) Reviu, terdiri dari:
- a) Reviu DAK Fisik Bidang Pendidikan (Tahap I, Tahap II, Tahap III) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - b) Reviu DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana (Tahap I, Tahap II, Tahap III) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
  - c) Reviu DAK Non Fisik Pengelolaan BOS Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - d) Reviu DAU Bidang Pendidikan 3 Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - e) Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Tahun 2026 pada Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat PPPK;
  - f) Reviu Keputusan Walikota Nomor 1328 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Terstandarisasi.
- 3) Monitoring dan/atau Evaluasi, terdiri dari:
- a) Evaluasi Hibah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
  - b) Evaluasi Hibah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
  - c) Evaluasi Hibah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  - d) Evaluasi Bansos Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - e) Evaluasi Bansos Dinas Sosial Kota Bandung;
  - f) Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PPDB;
  - g) Evaluasi Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah.
- 4) Pengawasan lainnya termasuk pendampingan Perangkat Daerah (*consulting*):
- a) Audit PBJ atas Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b) Verval sisa Dana BOS PAUD/Kesetaraan;
  - c) *Coaching Clinic*;
  - d) PK APiP.

d. Inspektur Pembantu IV, terdiri dari:

1) Pemeriksaan Kinerja, Ketaatan, SPM dan/atau NSPK, terdiri dari:

- a) audit kinerja pengendalian inflasi daerah tingkat Pemerintah Daerah;
- b) audit ketaatan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- c) audit ketaatan program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- d) pemeriksaan penerapan SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) pemeriksaan urusan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

2) Reviu, terdiri dari:

- a) reviu LPPD (verifikasi dan validasi; rancangan akhir) pada Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- b) reviu RPJMD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung;
- c) reviu RKPD Murni T.A. 2026 dan RKPD Perubahan T.A. 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung;
- d) reviu Renstra Perangkat Daerah;
- e) reviu Rencana Kerja T.A.2026 pada Semua Perangkat Daerah;
- f) reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Tahun 2026 pada Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat PPPK;
- g) reviu Keputusan Wali Kota Nomor 1328 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Terstandarisasi.

3) Monitoring dan/atau Evaluasi, terdiri dari:

- a) evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
- b) evaluasi hasil monitoring Hibah dan Bansos pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) evaluasi hasil monitoring Hibah dan Bansos pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;
- d) evaluasi manajemen risiko pada Perangkat Daerah.

4) Pengawasan lainnya termasuk pendampingan Perangkat Daerah (consulting):

- a) Audit PBJ atas implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b) *Coaching Clinic*;
- c) PK APIP.



e. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri dari:

1) Audit, terdiri dari:

- a) audit kepatuhan pada pengelolaan dana hibah Tahun 2025 pada 5 penerima nilai terbesar, pengelolaan dana bansos tahun 2025 pada 5 penerima nilai terbesar, pengelolaan dana bantuan keuangan Tahun 2025 pada 5 penerima nilai terbesar, pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada 9 mata Pajak/Piutang Pajak, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- b) audit ketaatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung.

2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari:

- a) *Probit Audit* pada proyek Strategis Pemda;
- b) Investigasi pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan investigatif, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin ASN;
- c) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah.

3) Reviu, terdiri dari:

- a) Reviu atas Honorarium pada 3 (tiga) Perangkat Daerah realisasi terbesar sampai dengan TW3 Tahun 2025;
- b) Reviu atas Perjalanan Dinas pada 3 (tiga) Perangkat Daerah realisasi terbesar sampai dengan TW3 Tahun 2025;
- c) Reviu atas Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah atas SSH, ASB, dan HSPK untuk digunakan dalam APBD 2026;
- d) Reviu Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah;
- e) Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi (Manajemen ASN) pada BKPSDM;
- f) Reviu Keputusan Walikota Nomor 1328 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Terstandarisasi.

4) Monitoring dan/atau Evaluasi, terdiri dari:

- a) Evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
- b) Evaluasi Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah;
- c) Evaluasi Implementasi TPP APIP pada BKPSDM;
- d) Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah pada BII;
- e) Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi: Pendampingan Pemenuhan Eviden MCP (Verifikasi dan Input Eviden)

5) Pengawasan lainnya termasuk pendampingan Perangkat Daerah (consulting):

- a) Pendampingan realisasi renaksi RB berdasarkan Kepwal RB General dan RB Tematik 2025;
- b) Asistensi dan Pendampingan Pengusulan ZI dan Evaluasi ZI;

- c) Konsultasi/Pendampingan Proyek Strategis;
- d) Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi ;
- e) Survei Penilaian Integritas (SPI);
- f) Sosialisasi Antikorupsi;
- g) Koordinasi Kerjasama APIP dan APH;
- h) *Coaching Clinic*;
- i) PK APIP.

## 2. Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan tahun 2025, Inspektorat Daerah didukung oleh 103 (seratus tiga) orang ASN, terdiri dari:

### a. Tenaga Struktural:

- 1) 1 (satu) orang Inspektur Daerah (Eselon II.b);
- 2) 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon III.a);
- 3) 1 (lima) orang Inspektur Pembantu (Eselon III.a);
- 4) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Sekretariat (Eselon IV.a);

### b. Tenaga Fungsional Tertentu sebanyak 92 (seratus dua) orang dengan klasifikasi berdasarkan jenjang jabatan dan jenis jabatan fungsional tertentu, sebagai berikut:

#### 1) 64 (enam puluh empat) orang Auditor:

##### a) Auditor Ahli, terdiri dari:

- (1) Ahli Utama : -
- (2) Ahli Madya : 7 (tujuh) orang
- (3) Ahli Muda : 18 (delapan belas) orang
- (4) Ahli Pertama : 29 (dua puluh sembilan) orang

##### b) Auditor Terampil, terdiri dari:

- (1) Penyelia : 2 (dua) orang
- (2) Mahir : 2 (dua) orang
- (3) Terampil : 6 (enam) orang

#### 2) 23 (dua puluh tiga) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) terdiri dari:

- a) Pengawas Pemerintahan Madya : 7 (tujuh) orang
- b) Pengawas Pemerintahan Muda : 10 (sepuluh) orang
- c) Pengawas Pemerintahan Pertama : 6 (enam) orang

#### 3) 2 (dua) orang Sub Koordinator/Ketua Tim pada Sekretariat.

- 4) 1 (satu) orang Perencana Muda.
- 5) 1 (satu) orang Arsiparis Muda.
- 6) 1 (satu) orang Perencana Pertama.

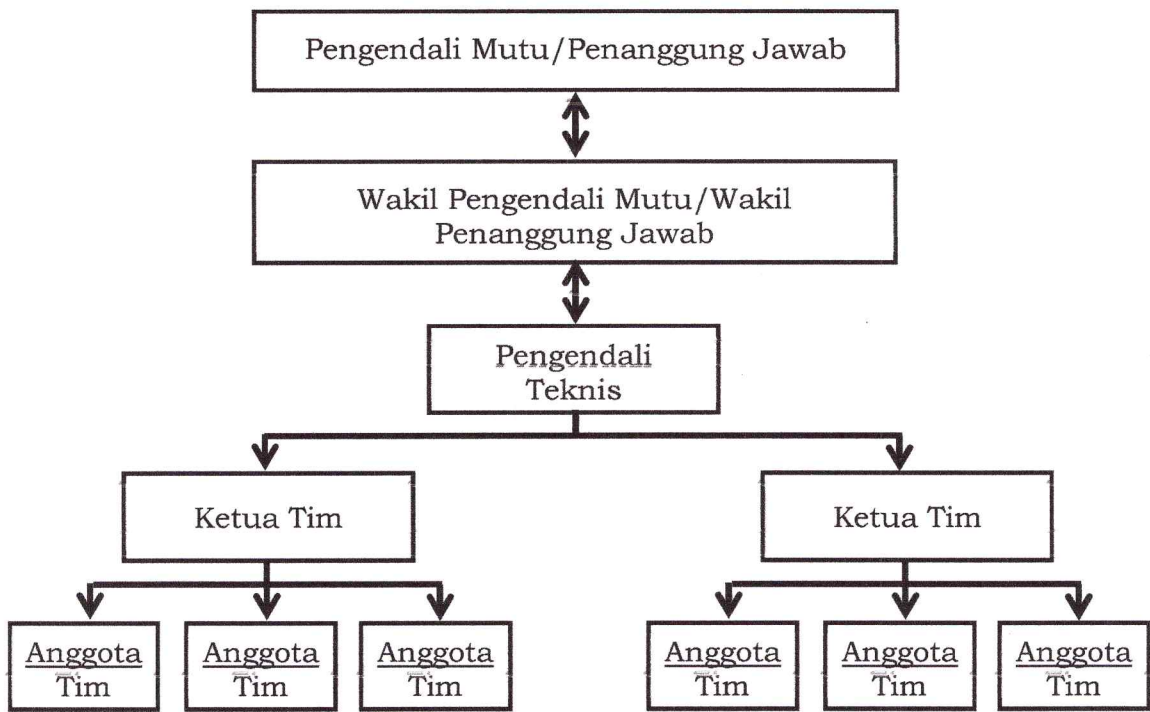
### c. Tenaga Fungsional Umum sebanyak 7 (enam) orang pada Sekretariat.



3. Tim Manajemen Pengawasan

Gambar IV.1

Struktur Tim Manajemen Pengawasan



Dalam satu gugus tugas terdiri dari:

- a. 1 Orang Wakil Penanggung Jawab;
- b. 1 Orang Pengendali Teknis;
- c. 2 Orang Ketua Tim;
- d. 6 orang Anggota Tim.

Untuk pelaksanaan pengawasan tahunan, susunan Tim Manajemen Pengawasan Inspektorat Daerah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Inspektur Daerah Kota Bandung selaku Penanggungjawab/ Pengendali Mutu;
- b. 5 (lima) orang Inspektur Pembantu selaku Wakil Penanggungjawab;
- c. 15 (lima belas) orang Pengendali Teknis;
- d. 20 (dua puluh) orang Ketua Tim; dan
- e. 57 (lima puluh tujuh) orang Anggota Tim.

Susunan tim manajemen pengawasan yang ditunjuk/diperankan/ difungsikan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah Inspektur Kota Bandung.

4. Anggaran Pengawasan dan Pemeriksaan

Biaya Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan
  - a. Laporan Hasil Audit Kinerja sebanyak 4 (empat) Laporan;
  - b. Laporan Hasil Audit Ketaatan sebanyak 14 (empat belas) Laporan;
  - c. Laporan Hasil Audit Kepatuhan sebanyak 5 (lima) Laporan;
  - d. Laporan Hasil Pemeriksaan Penerapan SPM sebanyak 6 (enam) Laporan;
  - e. Laporan Hasil Pemeriksaan Penerapan NSPK sebanyak 4 (empat) Laporan;
  - f. Laporan Hasil Reviu sebanyak 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) Laporan;
  - g. Laporan Hasil Monitoring dan/atau Evaluasi sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) Laporan;
  - h. Laporan Hasil Investigasi sebanyak 12 (dua belas) Laporan;
  - i. Laporan Hasil *Probitiy Audit* sebanyak 10 (sepuluh) Laporan;
  - j. Laporan Hasil Consulting dan Pengawasan Lainnya sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) Laporan.
6. Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan sesuai jadwal Program Kerja Pengawasan Berbasis Prioritas dan Risiko dan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

E. Pelaporan

Hasil dari pelaksanaan tugas pengawasan PKPT Tahun 2025 dengan tahapan, sebagai berikut:


1. Laporan triwulanan sebanyak 4 laporan;
2. Laporan semesteran sebanyak 2 laporan;
3. Laporan tahunan sebanyak 1 laporan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Perangkat Daerah Pendukung	Irbn Pengampu/ Wakil Penanggung Jawab	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
							RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ISU NASIONAL																				
1	Pengendalian Inflasi Daerah	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Pengendalian Inflasi Daerah	Pemda	Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan.	Irban 4	Oktober	Desember	1	2	30	60	540	633	107.610.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
2	Penanggulangan Kemiskinan	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Penanggulangan Kemiskinan	Pemda	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Irban 3	Oktober	Desember	1	2	30	60	540	633	107.610.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
3	Prevalensi Stunting	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Prevalensi Stunting	Pemda	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pemuda dan Olahraga	Irban 3	Oktober	Desember	1	2	30	60	540	633	107.610.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
4	Program Pengelolaan Persampahan	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup		Irban 1	Oktober	Oktober	1	2	20	20	140	183	31.110.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
5	Program Ketahanan Pangan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Irban 1	Juli	Juli	1	2	15	15	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
PROGRAM																				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan/Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Sekretariat Daerah		Irban 4	Mgg III Apr	Mgg I Mei	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan/Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Irban 4	Mgg III Apr	Mgg I Mei	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
PERANGKAT DAERAH																				
1	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		Irban 1	Agustus	Agustus	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
2	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Irban 1	Agustus	Agustus	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		



3	Dinas Perhubungan	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Perhubungan	Irban 1	Agustus	Agustus	1	2	20	20	80	123	20.910.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
4	Dinas Kesehatan	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Kesehatan	Irban 2	September	September	1	2	20	20	180	223	37.910.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	10	20	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	10	20	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	10	20	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
11	Dinas Pendidikan	Audit PBJ atas implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Pendidikan	Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	10	20	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	



12	Dinas Sosial	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Sosial		Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	10	20	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
13	Dinas Ketenagakerjaan	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Ketenagakerjaan		Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	10	20	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Irban 3	Agustus	Agustus	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
15	Sekretariat DPRD	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Sekretariat DPRD		Irban 4	Juni	Juni	1	2	1	20	80	104	17.680.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		Irban 4	Juni	Juni	1	2	1	20	60	84	14.280.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
17	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana		Irban 4	Juli	Juli	1	2	1	20	60	84	14.280.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Irban 4	Juli	Juli	1	2	1	20	80	104	17.680.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Irban 4	Agustus	Agustus	1	2	1	20	60	84	14.280.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit PBJ atas Implementasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN	Memberikan keyakinan memadai bahwa aspek Perencanaan, Persiapan, Tender, Pelaksanaan, dan Serah Terima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri serta norma dan prinsip PBJ.	Dinas Komunikasi dan Informatika		Irban 4	Agustus	Agustus	1	2	1	20	80	104	17.680.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	



AUDITABLE UNIT																				
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Irban 2	Februari	Februari	1	2	7	15	60	85	14.450.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Irban 2	Februari	Februari	1	2	8	15	60	86	14.620.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Irban 2	April	April	1	2	15	15	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Sedang		
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Irban 2	April	April	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Sedang		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Irban 2	Juni	Juni	1	2	8	15	45	71	12.070.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Sedang		
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Irban 2	Juni	Juni	1	2	7	15	45	70	11.900.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Sedang		
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Irban 2	Juli	Juli	1	2	8	15	45	71	12.070.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Sedang		
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Irban 2	Juli	Juli	1	2	7	15	45	70	11.900.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Sedang		
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Irban 2	Maret	Maret	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Sedang		
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Irban 2	Maret	Maret	1	2	15	15	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Sedang		
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																				
1	Urusan Kesehatan	Pemeriksaan Penerapan SPM	Untuk memastikan penerapan SPM berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.	Dinas Kesehatan		Irban 2	Oktober	Oktober	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
2	Urusan Pendidikan	Pemeriksaan Penerapan SPM	Untuk memastikan penerapan SPM berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.	Dinas Pendidikan		Irban 3	Oktober	Oktober	1	2	20	20	40	83	14.110.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
3	Urusan Sosial	Pemeriksaan Penerapan SPM	Untuk memastikan penerapan SPM berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.	Dinas Sosial		Irban 3	Oktober	Oktober	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
4	Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemeriksaan Penerapan SPM	Untuk memastikan penerapan SPM berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Irban 1	Oktober	Oktober	1	2	20	20	45	88	14.960.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat	Pemeriksaan Penerapan SPM	Untuk memastikan penerapan SPM berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana		Irban 4	Oktober	Oktober	1	2	20	20	80	123	20.910.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
				Satuan Polisi Pamong Praja		Irban 4	Desember	Desember	1	2	20	20	100	143	24.310.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																				
1	Urusan Ketenagakerjaan	Pemeriksaan Penerapan NSPK	Memastikan dan meyakinkan implementasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan NSPK yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah	Dinas Ketenagakerjaan		Irban 3	November	November	1	2	15	15	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
2	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeriksaan Penerapan NSPK	Memastikan dan meyakinkan implementasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan NSPK yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Irban 2	September	September	1	2	15	15	100	133	22.610.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		



3	Urusan Persandian	Pemeriksaan Penerapan NSPK	Untuk memastikan penerapan SPM berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.	Dinas Komunikasi dan Informatika		Irbn 4	November	November	1	2	15	15	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
4	Urusan Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Penerapan NSPK	Memastikan dan meyakinkan implementasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan NSPK yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah	Dinas Lingkungan Hidup		Irbn 1	02-Apr	12 Mei	1	2	15	15	80	113	19.210.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU																			
1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Audit Ketaatan	Kepatuhan Kepatuhan BPBJ terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Bagian BPBJ Setda	Seluruh Perangkat Daerah	Irbansus	Mei	Juni	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
2	Proyek Paket Strategis Pemda 1 TA 2026	Probitiy Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur yang berlaku	Tahap Perencanaan Pengadaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	Agustus	Agustus	1	2	10	20	80	113	19.210.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
3	Proyek Paket Strategis Pemda 2 TA 2026	Probitiy Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik raelalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur yang berlaku	Tahap Perencanaan Pengadaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	Agustus	Agustus	1	2	20	20	80	123	20.910.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
4	Proyek Paket Strategis Pemda 1	Probitiy Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik raelalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur yang berlaku	Tahap Persiapan Pengadaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 2	1	2	5	20	60	88	14.960.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
			Tahap Pelaksanaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 2	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
5	Proyek Paket Strategis Pemda 2		Meningkatkan integritas pelayanan publik raelalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur yang berlaku	Tahap Persiapan Pengadaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 2	1	2	5	20	80	108	18.360.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
			Tahap Pelaksanaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 2	1	2	10	20	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
6	Proyek Paket Strategis Pemda 3		Meningkatkan integritas pelayanan publik raelalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur yang berlaku	Tahap Persiapan Pengadaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 2	1	2	20	20	80	123	20.910.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
			Tahap Pelaksanaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 2	1	2	10	20	60	93	15.810.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi		
7	Proyek Paket Strategis Pemda 4		Meningkatkan integritas pelayanan publik raelalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur yang berlaku	Tahap Pelaksanaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 3	TW 4	1	2	5	20	80	108	18.360.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
8	Proyek Paket Strategis Pemda 5		Meningkatkan integritas pelayanan publik raelalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur yang berlaku	Tahap Pelaksanaan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 3	TW 4	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
9	Pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan investigatif	Investigasi 1	Untuk mengidentifikasi pelanggaran etika, kecurangan, penyalahgunaan dana, pelanggaran hukum, atau situasi lain yang dapat merugikan organisasi	Materi Pengaduan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
		Investigasi 2		Materi Pengaduan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	2	20	20	40	83	14.110.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
		Investigasi 3		Materi Pengaduan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
10	Pemeriksaan Terkait penyalahgunaan wewenang/ pelanggaran disiplin ASN	Investigasi 1	Untuk mengidentifikasi pelanggaran etika, kecurangan, penyalahgunaan dana, pelanggaran hukum, atau situasi lain yang dapat merugikan organisasi	Materi Pengaduan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	2	10	10	30	53	9.010.000,00	2	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
		Investigasi 2		Materi Pengaduan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	2	10	10	30	53	9.010.000,00	3	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
		Investigasi 3		Materi Pengaduan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	2	10	10	30	53	9.010.000,00	4	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
11	Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah	menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi	Materi Pengaduan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
12	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)/Assurance	Untuk memberikan pernyataan di pengadilan mengenai suatu penilaian atau hasil PKKN/D sebagai bahan pengambilan keputusan.	Materi Pengaduan	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	1	20	20	0	42	7.140.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
13	Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2025	Audit Kepatuhan	Kepatuhan Pengelolaan Dana Hibah terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5 Penerima Nilai Terbesar	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 1	TW 4	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
14	Pengelolaan Dana Bansos Tahun 2025	Audit Kepatuhan	Kepatuhan Pengelolaan Dana Bansos terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5 Penerima Nilai Terbesar	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 4	TW 4	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	



15	Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Tahun 2025	Audit Kepatuhan	Kepatuhan Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5 Penerima Nilai Terbesar	Perangkat Daerah terkait	Irbansus	TW 4	TW 4	1	2	20	20	40	83	14.110.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
16	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Audit Kepatuhan	Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan	9 Mata Pajak / Piutang Pajak	Perangkat Daerah Penghasil	Irbansus	Juli	Juli	1	2	20	20	100	143	24.310.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
17	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Audit Kepatuhan	Kepatuhan Pengelolaan Baraag Milik Daerah (BMD) terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan BMD	Seluruh Perangkat Daerah	Irbansus	Juni	Juni	1	2	20	20	60	108	17.510.000,00	1	Kendaraan, Laptop	Tinggi	
<b>REVIU</b>																			
1	Reviu LKPD	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 1	Februari	Maret	1	2	15	15	210	243	41.310.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
2	REVIU LPPD (Verifikasi dan Validasi)	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 4	Februari	Februari	1	2	15	15	255	288	48.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
3	REVIU LPPD (Reviu Rankhir)	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan LPPD	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 4	Maret	Maret	1	2	15	15	255	288	48.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
4	REVIU RPJMD	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan PJMD	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 4	April	April	1	2	15	15	135	168	28.560.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
5	REVIU RKPD MURNI TA 2026	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan RKPD MURNI TA 2026	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 4	Juni	Juni	1	2	15	15	255	288	48.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
6	REVIU RKPD PERUBAHAN TA 2025	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan RKPD PERUBAHAN TA 2025	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 4	April	April	1	2	15	15	135	168	28.560.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
7	REVIU RENSTRA PD	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan RENSTRA PD	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 4	Juli	Juli	1	2	15	15	120	153	26.010.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
8	REVIU RENCANA KERJA TA 2026	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan RENCANA KERJA TA 2026	Semua OPD	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 4	Juli	Juli	1	2	15	15	120	153	26.010.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
9	Reviu KUA-PPAS Perubahan	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan KUA-PPAS Perubahan	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 1	Juli	Juli	1	2	15	15	165	198	33.660.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
10	Reviu KUA-PPAS Murni	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan KUA-PPAS Murni	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 1	Juli	Juli	1	2	15	15	180	213	36.210.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
11	Reviu RKA-Perubahan	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan RKA-Perubahan	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 1	Septesaber	September	1	2	15	15	210	243	41.310.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
12	Reviu RKA Murni	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan RKA Murni	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah	Irban 1	Septesaber	September	1	2	15	15	210	243	41.310.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
13	Reviu atas Honorarium	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Honorarium	3 OPD Terbesar Tahun 2025, Realisasi s.d TW 3	Perangkat Daerah Terkait	Irbansus	TW 4	TW 4	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
14	Reviu atas Perjalanan Dinas	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Perjalanan Dinas	3 OPD Terbesar Tahun 2025, Realisasi s.d TW 3	Perangkat Daerah Terkait	Irbansus	TW 4	TW 4	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
15	Reviu atas Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah atas SSH ASB dan HSPK untuk digunakan dalam APBD 2026	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Rancangan Peraturan Kepala Daerah atas SSH ASB dan HSPK untuk digunakan dalam APBD 2026	Tahun 2026	Seluruh Perangkat Daerah	Irbansus	TW 2	TW 2	1	2	15	15	60	93	15.810.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	



16	Reviu Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah	BUMD	BII, Tirta Wening, Bank Bandung	Irbansus	TW 1	TW 1	1	2	15	15	120	153	26.010.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
17	Reviu DAK Fisik Bidang Sanitasi (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Fisik Bidang Sanitasi (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Irbn 1	TW 2	TW 4	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
18	Reviu DAK Fisik Bidang Pertanian (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Fisik Bidang Pertanian (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Irbn 1	TW 2	TW 4	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
19	DAK Fisik Bidang Kesehatan Realisasi Penyerapan 2024	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Fisik Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		Irbn 2	Februari	Februari	1	2	5	5	15	28	4.760.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
20	DAK Fisik Bidang Kesehatan Perencanaan Tahun 2025	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Fisik Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		Irbn 2	Oktober	Oktober	1	2	5	5	20	33	5.610.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
21	DAK Fisik Bidang Kesehatan	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Fisik Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		Irbn 2	Oktober	Oktober	1	2	5	5	20	33	5.610.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
22	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		Irbn 2	Juni	Juni	1	2	15	15	20	53	9.010.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
23	DAK Fisik Bidang Pendidikan (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Non Fisik Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan		Irbn 3	TW 2	TW 4	1	2	25	45	135	208	35.360.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
24	DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Irbn 3	TW 2	TW 4	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
25	Reviu DAK NonFisik Pengelolaan BOS Pendidikan	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAK Non Fisik Pengelolaan BOS Pendidikan	Dinas Pendidikan		Irbn 3	TW 2	TW 4	1	2	8	15	45	71	12.070.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
26	Reviu DAU Fisik Bidang Pekerjaan Umum (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Fisik Bidang Pekerjaan Umum (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Irbn 1	TW 2	TW 4	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
27	Reviu DAU Kelurahan Laporan Realisasi Tahun 2024	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Fisik Bidang Pekerjaan Umum (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Seluruh Kelurahan		Irbn 2	Januari	Januari	1	2	15	15	135	168	28.560.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
28	Reviu DAU Kelurahan Perencanaan Tahun 2025	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Seluruh Kelurahan		Irbn 2	April	April	1	2	5	5	40	53	9.010.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
29	Reviu DAU Kelurahan Realisasi Tahap I	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Seluruh Kelurahan		Irbn 2	Agustus	Agustus	1	2	15	15	135	168	28.560.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
30	Reviu DAU Kesehatan Laporan Realisasi Penyerapan 2024	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Dinas Kesehatan		Irbn 2	Januari	Januari	1	2	5	5	25	38	6.460.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
31	Reviu DAU Kesehatan Perencanaan Tahun 2025	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Dinas Kesehatan		Irbn 2	April	April	1	2	5	5	25	38	6.460.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	



32	Reviu DAU Kesehatan Realisasi Tahap 1	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Dinas Kesehatan	Irban 2	Agustus	Agustus	1	2	5	5	20	33	5.610.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
33	Reviu DAU Kesehatan Realisasi Tahap 2	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Dinas Kesehatan	Irban 2	November	November	1	2	5	5	20	33	5.610.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
34	Reviu DAU Bidang Pendidikan 3 Bidang	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU (Tahap I, Tahap II, Tahap III)	Dinas Pendidikan	Irban 3	TW 1	TW 4	1	2	25	45	135	208	35.360.000,00	3	Mamin, Laptop	Sedang	
35	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Januari 2026	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Januari	Januari	1	2	35	35	155	228	38.760.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
36	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Februari	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Februari	Februari	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
37	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Maret	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Maret	Maret	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
38	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK April	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	April	April	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
39	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Mei	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Mei	Mei	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
40	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Juni	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Juni	Juni	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
41	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Juli	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Juli	Juli	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
42	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Agustus	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Agustus	Agustus	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
43	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK September	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	September	September	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
44	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Oktober	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Oktober	Oktober	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
45	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK November	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	November	November	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
46	Reviu DAU Dana Penggajian Formasi PPPK Desember	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan DAU Dana Penggajian Formasi PPPK seluruh Perangkat Daerah Terkait	Seluruh Perangkat Daerah yang terdapat Tenaga PPPK	Irban 1 - 4	Desember	Desember	1	2	35	35	45	118	20.060.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	



47	REVIU KINERJA PELAYANAN PUBLIK (PADA SEKTOR KESEHATAN (RSUD, RSBK, RSKGM )	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelayanan Publik sektor kesehatan	RSBK, RSKGM	Dinas Kesehatan	Irban 2	Agustus	Agustus	1	2	20	20	60	103	17.510.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	Karena 2 Ruang lingkup
48		Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelayanan Publik sektor kesehatan	RSUD		Irban 2	November	November	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
49	REVIU PELAKSANAAN REKUITMEN, PROMOSI DAN MUTASI (MANAJEMEN ASN)	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan pelaksanaan promosi dan mutasi	BKPSDM		Irbanus	Oktober	Oktober	1	2	15	15	45	78	13.260.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
50	REVIU KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERIZINAN	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Sektor Perizinan	DPMPSTP	Perangkat Daerah terkait	Irban 1	September	September	1	2	15	15	90	123	20.910.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
51	Reviu Pencegahan Korupsi terkait Program Makan Bergizi Sehat yang didanai oleh APBD Tahun Berjalan	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Kegiatan Program Makan Bergizi Sehat yang di danai APBD	Disdik	Dinkes , Disdik	Irban 2	Agustus	Agustus	1	2	3	10	45	61	10.370.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
52	Reviu Keputusan Walikota NOMOR 1328 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PEMERINTAHAN TERSTANDARISASI	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Keputusan Walikota NOMOR 1328 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PEMERINTAHAN TERSTANDARISASI	Inspektorat Daerah	Bapeltibang, Bagian Organiassi	Seluruh Irban	Januari	Januari	1	1	5	5	40	52	8.840.000,00	1	Mamin, Laptop	Tinggi	Saigas
53	Reviu Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah	Reviu	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan bahwa penyertaan modal BUMD sudah sesuai aturan yang berlaku	PDAM	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Irbanus	Januari	Januari	1	2	10	10	30	53	9.010.000,00	1	Mamin, Laptop	Tinggi	
<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>																			
1	EVALUASI SAKIP	Evaluasi	Mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas program	Seluruh OPD		Irban 4	Mei	Mei	1	2	20	20	340	383	65.110.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
2	MONEV PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CINAMBO	Monitoring dan Evaluasi		Cinambo		Irban 2	April	Mei	1	2	10	10	40	63	10.710.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
3	EVALUASI REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK	Evaluasi	Mendapatkan Informasi Terkait Pelaksanaan dan Pencapaian Reformasi Birokrasi, Memantau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya, Memberikan Saran Perbaikan dan Membuat Profil Nasional tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Seluruh OPD		Irbanus	TW 1	TW 4	1	2	15	15	105	138	23.460.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
4	EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PERANGKAT DAERAH	Evaluasi	sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan, menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat	OPD Sampling		Irbanus	Januari	Januari	1	2	5	5	75	88	14.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
5	EVALUASI IMPLEMENTASI TPP APIP	Evaluasi	Pelaksanaan atas kepatuhan perundangan yang berlaku, rangka mendorong independensi dan objektivitas APIP.	BKPSDM		Irbanus	Februari	Februari	1	2	5	5	45	58	9.860.000,00	1	Mamin, Laptop	Tinggi	
6	Evaluasi Manajemen Risiko	Evaluasi	Melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko, baik di tingkat Daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah	Seluruh OPD		Irban 1 - 4	Mei	Mei	1	2	45	60	420	528	89.760.000,00	60	Mamin, Laptop	Tinggi	
7	Evaluasi Hibah Dispora	Evaluasi	Untuk menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.	Dispora		Irban 3	TW1	Tw4	1	2	5	5	20	33	5.610.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	



8	Evaluasi Hibah Dismaker	Evaluasi	Untuk menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.	Disnaker		Irban 3	TW1	Tw4	1	2	5	5	20	33	5.610.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
9	EvaluasiHibah Disbudpar	Evaluasi	Untuk menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.	Disbudpar		Irban 3	TW1	Tw4	1	2	5	5	15	28	4.760.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
10	Evaluasi Bansos Disdik	Evaluasi	Untuk menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.	Disdik		Irban 3	TW1	Tw4	1	2	5	5	15	28	4.760.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
11	Evaluasi Bansos Dinsos	Evaluasi	Untuk menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.	Dinsos		Irban 3	TW1	Tw4	1	2	5	5	15	28	4.760.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
12	Evaluasi hasil Monitoring Hibah dan Bansos	Evaluasi	Untuk menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.	Kesbangpol		Irban 4	TW1	Tw4	1	2	5	5	15	28	4.760.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
13	Evaluasi hasil Monitoring Hibah dan Bansos	Evaluasi	Untuk menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah		Irban 4	TW1	Tw4	1	2	5	5	20	33	5.610.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
14	Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PPDB	Evaluasi	Untuk menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.	Dinas Pendidikan		Irban 3	Juni	Juli	1	2	10	15	100	128	21.760.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
15	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah	Monitoring dan Evaluasi	Untuk mengevaluasi dan penilaian atas capaian kinerja BII serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja BUMD.	BII	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Irban3us	Januari	Januari	1	2	10	10	40	63	10.710.000,00	2	Mamin, Laptop	Sedang	
16	Monev Aksi Pencegahan Korupsi: Pendampingan Pemenuhan Eviden MCP (Verifikasi dan Input Evidence)	Monitoring dan Evaluasi		2025	Perangkat Daerah Terkait	Irban3us	TW 2	TW 4	1	5	-	-	80	86	14.620.000,00	1	Mamin, Laptop	Tinggi	Satgas
17	Monitoring dan Evaluasi hasil COSO	Monitoring dan Evaluasi		Semua OPD		Irban 1	Januari	Januari	1	2	15	15	210	243	41.310.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
CONSULTING																			
1	Pendampingan Realisasi Renaksi RB Berdasarkan Kepwal RB General dan RB Tematik 2025	Consulting		Semua OPD		Irban3us	TW1	TW 4	1	2	20	20	340	383	65.110.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
2	ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PENGUSULAN ZI,EVALUASI ZI	Consulting		Semua OPD		Irban3us	TW 2	TW 4	1	2	20	20	340	383	65.110.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
3	Pendampingan pelaksanaan COSO	Consulting		Semua OPD		Irban 1	Desember	Januari	1	2	5	5	70	83	14.110.000,00	60	Mamin, Laptop	Sedang	
4	Konsultasi/pendampingan proyek strategis	Consulting		Semua OPD Terkait		Irban3us	TW 1	TW 4	1	2	5	5	75	88	14.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
5	Coaching Clinic	Consulting		Semua OPD Terkait		Seluruh Irban	TW 1	TW 4						100	17.000.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
PENGAWASAN LAINNYA																			
1	Hibah/Bansos Dinas Kesehatan	Pengawasan Lainnya		Dinas Kesehatan		Irban 2	Juli	Juli	1	2	5	5	20	33	5.610.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
2	Verval sisa Dana BOP PAUD/Kesetaraan	Pengawasan Lainnya		Dinas Pendidikan		Irban 3	TW 2	TW 4	1	2	3	5	15	26	4.420.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
3	Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi	Pengawasan Lainnya		Semua OPD		Irban3us	Agustus	Agustus						25	4.250.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	Satgas
4	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Pengawasan Lainnya		Semua OPD		Irban3us	TW 2	TW 4						25	4.250.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	Satgas
5	Sosialisasi Antikorupsi	Pengawasan Lainnya		Semua OPD		Irban3us	TW 2	TW 4						30	5.100.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	Satgas
6	Koordinasi kerjasama APIP dan APH	Pengawasan Lainnya		Semua OPD		Irban3us	TW 1	TW 4						15	2.550.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	Satgas
7	PK APIP	Pengawasan Lainnya		2024-2025		Seluruh Irban	TW 2	TW 3						100		1	Mamin, Laptop	Sedang	Satgas
PENINGKATAN KOMPETENSI																			
Diklat Substantif																			
1	Diklat Manajemen Risiko	Peningkatan Kompetensi				Irban 1	TW 1	TW 4						50		1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Tinggi	BPKP



2	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Kompetensi				Seluruh Irbn	TW 1	TW 4							80		1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Sedang	BPKP
3	Diklat Pemeriksaan Kinerja Sampah	Peningkatan Kompetensi				Irbn 1	Oktober	Oktober							80		1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Tinggi	BPK Jogja
4	Diklat Pemeriksaan BMD	Peningkatan Kompetensi				Irbansus	29-Sep	3 oktober							12	78.900.000,00	1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Tinggi	BPK Bali
5	Diklat Pemeriksaan BUMD	Peningkatan Kompetensi				Irbansus	JULI	JULI							60	78.900.000,00	1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Tinggi	BPK Bali
6	Diklat Pemeriksaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Kompetensi				Irbansus	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS							60	78.900.000,00	1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Tinggi	BPK Bali
7	Diklat Revisi SSH ASB	Peningkatan Kompetensi				Irbansus	APRIL	APRIL							60	78.900.000,00	1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Tinggi	BPKP
8	DIKLAT SAKIP	Peningkatan Kompetensi				Seluruh Irbn	TW 1	TW 4							95		1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Tinggi	
9	DIKLAT SPM	Peningkatan Kompetensi				Seluruh Irbn	TW 1	TW 4							95		1	Paket Perjalanan Dinas Diklat	Tinggi	
Sertifikasi																				
Sertifikasi CGAA/CGAE																				
1	CGAA	Peningkatan Kompetensi				Seluruh Irbn	TW 1	TW 4							50				Sedang	
2	CGAE	Peningkatan Kompetensi				Seluruh Irbn	TW 1	TW 4							35				Sedang	
3	Certified Internal Auditor (CIA) Review	Peningkatan Kompetensi				Seluruh Irbn	TW 1	TW 4											Sedang	
Bimbingan Teknis																				
1	E-Audit E-Purchasing	Peningkatan Kompetensi				Seluruh Irbn	TW 1	TW 1							100			Narsum, Tempet, Cetak Sertifikat	Tinggi	
2	Audit IT	Peningkatan Kompetensi			Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	TW 1	TW 4							100				Sedang	
KEGIATAN KESEKRETARIATAN																				
Kolaborasi Irbn																				
1	Perubahan PKPT 2025 dan Penyusunan PKPT Tahun 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	November	Desember							32	2.112.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
2	Rapat Pleno PKPT 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	November	Desember							130	8.580.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
3	Pemutakhiran Data TLHP Internal (Semester 1 dan 2)	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	Mei, Juni, November	Juli, Desember							166	10.956.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
4	PDL D Studi Tiru	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	Juni	Juli							195	12.870.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
5	Peningkatan Aparatur/Capacity Building/ Pembinaan SDM/Character Building	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	Juni, Desember	Juni, Desember							655	43.230.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
6	Rakorbinwas (Larwasda)	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	November	Desember							65	4.290.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
7	PK APIP	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	Maret	Juni							40	2.640.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
8	Hakordia	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	November	Desember							60	3.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
9	Pelaksanaan Diklat	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh Irbn	Februari, Mei, Juli, September	Februari, Mei, Juli, September							460	30.360.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
Sekretariat																				
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Januari	Januari							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
2	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Individu (IKI), dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Januari	Januari							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Januari	Januari							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
4	Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Januari	Januari							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	



5	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Tahun 2024	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Januari	Mei							60	3.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
6	Penyusunan Laporan Pj. Wali Kota Triwulanan	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Februari	Februari							25	1.650.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
7	Rekonsiliasi Anggaran Bulanan	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Februari	Desember							36	2.376.000,00	12	Mamin, Laptop	Sedang	Dilaksanakan setiap bulan
8	Persiapan Pendampingan BPK Semester 1	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Februari	Februari							20	1.320.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
9	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulanan	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Maret	Desember							20	1.320.000,00	4	Mamin, Laptop	Sedang	Dilaksanakan setiap triwulan
10	Penyusunan Monev Triwulanan (form e81)	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Maret	Desember							20	1.320.000,00	4	Mamin, Laptop	Sedang	Dilaksanakan setiap triwulan
11	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) Triwulanan	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Maret	Desember							20	1.320.000,00	4	Mamin, Laptop	Sedang	Dilaksanakan setiap triwulan
12	Penyusunan Profil dan Laporan Triwulanan Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP)	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Maret	Desember							20	1.320.000,00	4	Mamin, Laptop	Sedang	Dilaksanakan setiap triwulan
13	Pendampingan BPK Semester 1	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Maret	Mei							30	1.980.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
14	Inventarisasi dan Rekon Aset Tetap dan Persediaan Triwulanan	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Maret	Desember							36	2.376.000,00	4	Mamin, Laptop	Sedang	Dilaksanakan setiap triwulan
15	Penyusunan Renstra 2025 - 2029	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	April	Mei							30	1.980.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
16	Penyusunan Renja Awal 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Mei	Juni							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
17	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKJ) 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Mei	Juni							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
18	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Mei	Juni							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
19	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli							20	1.320.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
20	Persiapan Pemutakhiran Internal Semester II	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
21	Pemutakhiran Internal Semester 1	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli							20	1.320.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
22	Pemutakhiran Inspektorat Provinsi Semester 1	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
23	Pembinaan Pegawai	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juni							45	2.970.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
24	Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Agustus	September							20	1.320.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
25	Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Oktober	November							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
26	Penyusunan Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli							45	2.970.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
27	Character Building	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Desember	Desember							45	2.970.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
28	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	November	Desember							60	3.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
29	Pleno Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Desember	Desember							30	1.980.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
30	Pendampingan BPK Semester 2	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Oktober	Desember							60	3.960.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
31	Persiapan Pemutakhiran Internal Semester 2	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	November	Desember							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
32	Pemutakhiran Internal Semester 2	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	November	Desember							25	1.650.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
33	Pemutakhiran Inspektorat Provinsi Semester 2	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	November	Desember							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
34	Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (Gelar Pengawasan)	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Desember	Desember							45	2.970.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	



35	Cash Opname dan Stock Opname	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Desember	Desember							15	990.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	
36	Pelaksanaan Diklat	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Februari, Mei, Juli, September	Februari, Mei, Juli, September							75	4.950.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang	

Pj. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
SANTOSA LURMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

